

SEJARAH PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR NUSANTARA

Asep Kurniawan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: asepqurniawan.ak@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat pesisir di Indonesia adalah masyarakat yang pada umumnya memiliki tipikal terbuka. Sifat keterbukaannya pada dunia luar membuat celah dan peluang bagi masuknya proses pendidikan dalam wujud pengaruh baik ekonomi, budaya maupun kepercayaan dari luar yang datang silih berganti. Dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas adalah berdagang (pengusaha) dan nelayan membuka ruang bagi mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang luar. Relasi-relasi itulah yang membuka jalan bagi mereka yang memiliki visi, misi dan tujuan tertentu dalam arus pendidikan. Namun sayangnya pendidikan bagi masyarakat pesisir yang awalnya memberikan dinamika positif bagi kemajuan berbagai bidang kehidupan, pada perkembangan selanjutnya mengalami degradasi seiring semakin marginalnya kehidupan masyarakat pesisir yang dikenal dengan the poorest of the poor.

Key words: Pendidikan, Masyarakat, Terbuka, Pesisir

PENDAHULUAN

Berbagai studi masyarakat pesisir yang mengupas berbagai hal menunjukkan minat dan perhatian yang bervariasi. Aneka ragam karya tersebut bukan hanya tercermin dalam hasil karya peneliti dari luar maupun dalam negeri, tetapi juga meliputi tema-tema pembahasan, baik yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia, sejarah, pendidikan, sumber daya alam, kelembagaan, maupun yang lainnya.

Untuk kajian tentang sejarah pendidikan daerah pesisir, kajian ini masih cukup langka. Yang termasuk banyak dikaji adalah studi tentang budaya masyarakat pesisir, itupun gema kegiatan ini masih terlalu lemah, dan pada umumnya tema yang diambil hanya berjalan seiring dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan sumber daya laut.

Dilihat dari sudut sejarah pendidikan, sumbangan terpenting yang diberikan oleh kondisi geografis pesisir yang kaya akan sumber daya alam bertalian dengan perwujudan dari suatu perkembangan budaya yang di dalamnya mencakup perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Sampai saat ini, kita masih dapat melihat kekuatan karakteristik bahari yang mempengaruhi perkembangan pendidikan pada banyak wilayah pesisir Nusantara. Sejarah mencatat bahwa sebagai wilayah yang terbuka, sejak dulu sebagian besar wilayah pesisir yang termasuk wilayah Nusantara telah mengalami pengaruh pendidikan dari luar.

Beberapa aspek penting yang menjadi latar belakang perlunya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sejak dahulu banyak wilayah pesisir dikenal sebagai wilayah bandar jalur perdagangan dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan kandungan potensi sumber daya kelautan yang besar.
2. Sebagai daerah pesisir, di samping memiliki karakter asli pendidikannya, dalam pendidikan luar - Timur Tengah, India, Cina, Eropa - dengan tiada henti telah mempengaruhi. Meskipun pengaruh tersebut tetap hidup sampai sekarang, namun kekuatan pendidikan Islam pada akhirnya berhasil mewujud sebagai sebuah kekuatan yang dominan.
3. Bagi masyarakat pesisir, kemunculan beragam pendidikan di tengah mereka difahami sebagai *multiplier effect and response*, serta adaptasi atas transformasi pendidikan dan perubahan yang terjadi. Keseluruhan proses tersebut memiliki arti penting dan menentukan, karena sementara tatanan lama dipertahankan, tatanan baru yang terkadang berbeda sama sekali mulai muncul.

Dari beberapa keterangan singkat di atas, pengungkapan dan penelaahan sejarah pendidikan di pesisir perlu dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan nuansa baru pengungkapan sejarah.

MASYARAKAT PESISIR

Secara teoritis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di

wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

Menurut Fahmi, masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.¹ Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain. Yang harus diketahui bahwa setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda.

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan mencari ikan. Pelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol.

Masyarakat pesisir mempunyai keadaan yang berbeda dalam pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya dibandingkan dengan masyarakat lain. Namun kesemuanya secara umum masih dalam keterbelakangan dan marjinal. Sayangnya, mereka tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah tersebut.²

KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT DAN GEOGRAFIS PESISIR YANG MEMPENGARUH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Disamping sebagai negara agraris Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim, karena keadaan geografisnya yang didominasi oleh wilayah perairan.

¹ Joy Hendry, *An Introduction to Social Anthropology : Other Peoples Works*, (London: MacMillan Press Ltd., 1999), h.56.

²Owen J. Lynch-Emily Harwell, *Whose Natural Resources? Whose Common Good? Toward a New Paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*, (Washington D.C, U.S.A.: Center of International Environment Law (CIEL), 2002), h. 27.

Hampir 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut dan sisanya adalah pulau yang berjumlah 17.480 buah. Konsekwensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada terwujudnya aktifitas pelayaran di wilayah Indonesia.

Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, etnis dan budaya. Sebagai negara yang memiliki struktur wilayah perairan yang luas tentu mendorong kepada suatu aktifitas yang bersumber dari atau di air. Dalam konteks ini adalah perdagangan. Perdagangan menjadi opsi pertama mengapa orang-orang dari berbagai belahan dunia mau mengembara ke negeri seberang atau wilayah orang, tidak lain karena faktor keuntungan. Untung menjadi tujuan utama kebanyakan orang. Untung di sini tentu dalam arti luas. Artinya tidak hanya materi tetapi non-materi juga termasuk.

Jalur air berupa laut menjadi jalan utama adanya relasi atau hubungan dengan masyarakat luar. Dengan terbangunnya jalur perdagangan laut maka bermunculan pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota dagang di pesisir pantai di berbagai wilayah di Indonesia. Dunia perdagangan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ketika zaman Hindu-Budha (abad ke-1) bahkan saya berasumsi sudah ada sejak zaman prasejarah (manusia belum mengenal tulisan). Dalam sejarah kemaritiman, banyak kita temukan dunia perdagangan dan pelabuhan semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindhu-Budha maupun Islam.

Hubungan atau relasi dagang yang terjadi tidak hanya antar masyarakat lokal setempat melainkan antara wilayah atau pulau dan skala internasional yaitu dengan para pedagang (saudagar) Asing dari berbagai belahan dunia. Hubungan yang awalnya terbentuk sebagai hubungan dagang lama-kelamaan menjadi semakin kompleks dan variatif. Tidak hanya dalam urusan berdagang saja melainkan sudah mulai merambah ke sektor-sektor lain seperti pendidikan yang berbarengan dengan misi agama.

Banyak masyarakat (khususnya para pedagang/saudagar) dari luar yang mulai menetap dan kemudian tinggal berbaur dengan masyarakat setempat atau tinggal berkelompok (komunitas) di daerah pesisir di sepanjang pantai di Indonesia seperti di pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Tentu kita pernah mendengar Kampung Arab, Kampung Eropa atau Kampung Cina. Kampung-kampung tersebut dihuni oleh komunitas sesuai namanya. Jadi sebagian ada yang mau tinggal berbaur dengan masyarakat pribumi setempat dan ada pula yang lebih suka tinggal bersama dengan orang-orang yang sama asalnya (se-suku, se-etnis, se-agama atau se-negara) terbukti dengan dibuatnya kampung komunitas mereka masing-masing.

Dalam sejarah perkembangan pendidikan masyarakat pesisir tentu pelabuhan menjadi suatu tempat yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Pengaruhnya begitu sangat terasa bagi mereka yang tinggal di pesisir-pesisir pulau. Pelabuhan-pelabuhan menjadi tempat yang paling utama dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru karena disitulah pangkal kegiatan (transaksi) jual beli, tukar-menukar barang, maupun aktifitas lainnya dilakukan. Jika dianalogikan maka pelabuhan adalah terminal dimana berbagai alat transportasi darat keluar masuk. Pelabuhan-pelabuhan dalam sejarah Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha berdiri. Biasanya selain memiliki pelabuhan dagang juga memiliki seperangkat armada laut yang kuat untuk mengarungi luasnya lautan lepas dimana sewaktu-waktu dapat dibajak atau diserang kapal musuh.

Sejarah perkembangan pendidikan di masyarakat pesisir tidak terlepas dari faktor biofisik wilayah. Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka (*open access*). Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan cenderung memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka.

Kondisi tersebut berbeda dengan sifat kepemilikan bersama (*common property*) seperti yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon dengan kelembagaan Sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-Awig dan Sangehe, Talaud dengan kelembagaan Maneeh yang pengelolaan sumberdayanya diatur secara komunal. Dengan karakteristik *open access* tersebut, kepemilikan tidak diatur, setiap orang bebas memanfaatkan sehingga dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya.

Masyarakat pesisir pantai berbeda dengan masyarakat di wilayah pedalaman. Masyarakat pesisir secara struktur dihuni oleh masyarakat yang heterogen yaitu beragam suku, etnis, agama dan budaya. Karena struktur masyarakat pesisir sangat plural, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai

budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.

Sedangkan masyarakat pedalaman cenderung homogen yaitu tunggal atau asli masyarakat setempat. Masyarakat pesisir pantai pada umumnya lebih bersifat terbuka dengan pengaruh budaya luar. Hal itu berkebalikan pula dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman yang mana pada umumnya lebih bersifat tertutup dan tidak suka menerima tamu luar. Masyarakat pesisir lebih menunjukkan modernitasnya.

Masyarakat pedalaman atau desa pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan, kekeluargaan, kegotongroyongan lebih tinggi dari pada masyarakat kota. Dalam konteks ini masyarakat pesisir masuk dalam kategori masyarakat kota karena secara kriteria hampir sama. Dalam masyarakat pedalaman atau desa, kebanyakan masih bersifat saudara atau menganggap saudara sehingga mereka masih mengenal satu sama lain dalam lingkup masyarakatnya. Hal itu tampaknya berkebalikan dengan tipikal masyarakat kota pesisir atau kota pada umumnya yang cenderung kurang mengenal satu sama lain. Sehingga tingkat kegotongroyongannya pun juga jauh lebih rendah.

Sifat masyarakat pesisir yang cenderung terbuka membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pendidikannya. Banyak masyarakat dari luar baik luar pulau maupun luar negeri yang kemudian datang untuk tujuan tertentu. Bagi mereka sifat atau karakter terbuka tersebut menjadi peluang atau pintu masuk dalam mencapai tujuan. Tujuan inilah yang menjadi penting untuk kita kaji secara lebih mendalam.

SEJARAH PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR

Dalam dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang sudah saya jelaskan tersebut tentu terjadi proses pendidikan. Proses pendidikan lahir karena masyarakat pesisir yang dinamis. Proses pendidikan adalah adanya pengaruh atau penanaman pengetahuan, keyakinan maupun keterampilan dalam banyak bidang terutama ekonomi, budaya dan agama yang lekat dengan masyarakat pesisir. Secara garis besar saya mengklasifikasikannya ke dalam berbagai jenis proses pendidikan ekonomi, budaya dan agama.

Pertama pendidikan dalam interaksi ekonomi. Masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai pedagang atau nelayan tentu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan demi memenuhi segala kebutuhan. Sistem-sistem dalam dunia ekonomi yang diajarkan oleh pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar

dari luar (luar pulau atau luar negeri) yang datang untuk bertransaksi. Hal itu bisa dengan cara disengaja maupun tidak disengaja oleh para pelaku. Bagaimana sistem modal dijalankan dalam suatu ranah perdagangan, bagaimana sistem mencari dan menarik konsumen, bagaimana sistem penjualan dan pemasaran, bagaimana sistem mempertahankan kepercayaan terhadap konsumen dan sebagainya. Semua berdasarkan hitungan ekonomi rugi-laba yang diajarkan oleh para saudagar dari luar.

Jalur air berupa laut menjadi jalan utama adanya relasi atau hubungan dengan masyarakat luar. Dengan terbangunnya jalur perdagangan laut maka bermunculan pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota dagang di pesisir pantai di berbagai wilayah di Indonesia. Dunia perdagangan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ketika zaman Hindu-Budha (abad ke-1) bahkan saya berasumsi sudah ada sejak zaman prasejarah (manusia belum mengenal pendidikan tulis menulis). Dalam sejarah kemaritiman, banyak kita temukan dunia perdagangan dan pelabuhan semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindhu-Budha maupun Islam. Kota-kota pusat kerajaan atau kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18 misalnya, Samudera Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Goa-Tallo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya.

Hubungan atau relasi dagang yang terjadi tidak hanya antar masyarakat lokal setempat melainkan antara wilayah atau pulau dan skala internasional yaitu dengan para pedagang (saudagar) asing dari berbagai belahan dunia. Hubungan yang awalnya terbentuk sebagai hubungan dagang lama-kelamaan menjadi semakin kompleks dan variatif. Tidak hanya dalam urusan berdagang saja melainkan sudah mulai merambah ke sektor-sektor lain, seperti pendidikan.

Pedagang-pedagang dari Cina misalnya. Pedagang dari Cina terkenal akan keuletannya, kegigihannya, dan tentu keberhasilannya. Gelombang pertama datangnya para imigran asal Cina daratan itu telah mengajarkan kepada kaum pribumi akan etos kerja dan jiwa entrepreneur. Tentu itu menjadi salah satu inspirasi. Tidak hanya Cina, musyafir-musyafir dari Arab, Persia, Gujarat juga memberi pengaruh besar dalam mengajarkan bagaimana melaksanakan sistem perdagangan yang baik dan benar. Mereka datang jauh-jauh tentu sudah dengan persiapan yang matang baik tujuan dagang maupun tujuan yang lainnya.

Proses pendidikan dalam interaksi ekonomi dalam konteks ini, nampaknya lebih mengarah pada kapitalisme, yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan

membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.³ Artinya paham tentang kapital yaitu berkaitan erat perhitungan untung-rugi. Menggunakan modal yang seminimal mungkin dengan harapan mendapatkan untung yang semaksimal mungkin. Hal itu dapat kita lihat dari tulisan Tsuyoshi Kato (1986) dalam artikelnya “Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX”. Dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa dunia perdagangan di pesisir menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para saudagar karena sangat berpeluang untuk mendapatkan untung yang besar. Hal itu tergantung pada usaha, relasi dan juga modal. Dari tulisannya maka banyak kita pelajari bagaimana seorang pedagang yang harus banyak belajar baik dari pedagang lokal (setempat) maupun pedagang dari luar (manca). Banyak saudagar-saudagar besar datang dari luar. Dari situlah para pedagang lokal banyak belajar mengenai sistem ekonomi. Tentu hal itu tidak mutlak karena dalam hal berdagang siapa saja bisa belajar tidak hanya di wilayah perairan tetapi juga di pedalaman yang sudah mengenal sistem ekonomi (untung-rugi).

Akibat interaksi sosial yang intens antar pedagang akhirnya sistem ekonomi kapitalis dengan sengaja atau sendirinya menjadi “membumi putra”. Sistem ekonomi tersebut turun-temurun terhadap anak cucu sebagai generasi selanjutnya. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat pesisir adalah turun temurun mewarisi orang tuanya (genealogis). Bila sang ayah adalah seorang pedagang atau nelayan maka anaknya juga akan berprofesi sama. Hal itu tentu karena sejak kecil biasanya anak-anak mereka sudah dididik membantu orang tua mencari nafkah. Bagaimana berdagang yang baik, menjadi nelayan yang baik. Sehingga tidak heran jika di masyarakat pesisir banyak anak-anak kecil yang sudah pandai berdagang. Mereka belajar dari apa yang mereka dapatkan dari orang tua. Jadi selain faktor genealogis juga karena faktor pendidikan melalui lingkungan dan kebiasaan.

Yang kedua adalah proses pendidikan budaya. Kebudayaan sendiri itu merupakan respons dari masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi dalam hidupnya. Kebudayaan adalah hasil karya manusia baik berupa materi, gagasan, ide atau tindakan yang semuanya itu bisa diperoleh melalui cara belajar. Artinya budaya itu karena diajarkan. Sedangkan penerima budaya mau mempelajari dan akhirnya melakukan. Oleh karena itu, kebudayaan bukanlah milik individu-individu melainkan milik seluruh masyarakat. Dengan begitu para antropolog

³Chris Jenks, *Core Sociological Dichotomies*. London, England, UK; Thousand Oaks, (California, USA; New Delhi, India: SAGE, 1998), h. 383; Ayn Rand, *Capitalism: The Unknown Ideal* (paperback 2nd ed.), (New York: Signet, 1967), h. vii.

kerap kali mendefinisikan kebudayaan itu sebagai pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia.⁴ Tak disangkal lagi bahwa proses pendidikan adalah denyut dari kebudayaan.

Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya. Dalam kebudayaan masyarakat pesisir, media transfer yang paling efektif dalam pembentukannya adalah pendidikan. Antara pendidikan dan kebudayaan keduanya sangat erat hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain.

Pendidikan budaya dalam lingkungan masyarakat pesisir tentu banyak sekali jenisnya. Budaya-budaya dari luar banyak yang dibawa masuk dan kemudian bertemu dengan budaya setempat (*culture encounter*).

Karena sifat hidup masyarakat pesisir pantai yang cenderung sangat terbuka maka hal itu merupakan celah yang sangat terbuka lebar bagi masuknya pengaruh-pengaruh dari luar terutama dibawa oleh para pedagang atau nelayan asing. Misalnya saja dalam hal musik. Banyak aliran-aliran musik dari luar seperti musik “keroncong” dari Portugis yang kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat di daerah pesisir. Seperti diketahui bahwa Musik Keroncong masuk ke Indonesia sekitar tahun 1512, yaitu pada waktu *Ekspedisi Portugis* pimpinan *Alfonso de Albuquerque* datang ke Malaka dan Maluku tahun 1512. Tentu saja para pelaut Portugis membawa lagu jenis *Fado*, yaitu lagu rakyat Portugis bernada Arab (tangga nada minor, karena orang *Moor Arab* pernah menjajah Portugis/Spanyol tahun 711 - 1492. Lagu jenis *Fado* masih ada di Amerika Latin (bekas jajahan Spanyol), seperti yang dinyanyikan Trio Los Panchos atau Los Paraguayos, atau juga lagu di Sumatera Barat (budaya Arab) seperti *Ayam Den Lapeh*.⁵

Kemudian dalam hal bangunan. Banyak sekali bangunan-bangunan model Eropa sejak abad ke-16 yaitu sejak masuknya Portugis, Belanda, Cina, Arab dan lain-lain ke nusantara. Arsitektur Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sejarah dan geografi di Indonesia. Para penjajah, dan pedagang membawa perubahan kebudayaan yang sangat mempengaruhi gaya dan teknik konstruksi bangunan. Pengaruh asing yang paling kental pada zaman arsitektur

⁴Parsudi Suparlan, “Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi”, dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Pusjarlit, 1998), h. 111.

⁵Sunaryo Joyopuspito, *Musik Keroncong: Suatu Analisis Berdasarkan Teori Musik*. (Jakarta: Bina Musik Remaja, 2006)

klasik adalah India, meskipun pengaruh Cina dan Arab juga termasuk penting. Kemudian pengaruh Eropa pada seni arsitektur mulai masuk sejak abad ke-18 dan ke-19.⁶

Tidak hanya itu dari kancah lokal pun juga saling mempengaruhi. Misalnya saja orang Jawa yang bermigrasi ke daerah perantauan Sumatera khususnya daerah pesisir. Secara sengaja tidak sengaja orang Jawa membawa budaya mereka ke sana. Kemudian karena jumlah orang Jawa di sana semakin banyak maka kemudian mereka menjadi mayoritas. Hal itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir yang sudah ada sebelumnya. Secara lambat laun budaya-budaya Jawa tertentu mulai mereka ikuti. Misalnya saja adalah bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang paling vital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal berdagang bahasa sangat penting dalam rangka tercapainya suatu kesepakatan. Tidak hanya orang Jawa saja tetapi juga suku-suku lain seperti Bugis Makasar, Suku Papua, Melayu Malaysia dan sebagainya. Jadi tidak heran jika daerah pesisir apalagi yang statusnya adalah kota, tingkat pengaruh budaya sangat tinggi. Sehingga masyarakat pesisir mampu menguasai beberapa bahasa (bilingual) yang digunakan sehari-hari khususnya berniaga.

Banyak sastra Melayu yang juga merupakan bagian dari kompleks kesusatraan Pesisir yang sama. Dan dalam bermacam-macam konteks dan bahasa satu jenis narasi tertentu terus-menerus muncul sebagai contoh sastra Pesisir yakni cerita Panji, Pangeran Jawa dari Kahuripan.

Budaya masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh budaya berbagai macam agama. Di daerah pantai utara Jawa, misalnya, yaitu Indramayu, dan Cirebon terdapat upacara nadran yaitu mempersembahkan sesajen yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya kepada penguasa laut agar diberi limpahan hasil laut, sekaligus merupakan ritual tolak bala (keselamatan).

Yang ketiga adalah pendidikan agama (kepercayaan). Pendidikan agama disini identik dengan dakwah keagamaan. Hal ini menjadi lumrah karena hal itu sudah ada sejak zaman Hindu-Budha masuk ke nusantara. Disamping berdagang sebagian para saudagar dari luar juga memiliki misi penyebaran agama (dakwah).⁷ Sebagai gambaran para saudagar itu disamping membawa barang

⁶P. Schoppert, Damais, S. 1997. *Java Style*, (Paris: Didier Millet)

⁷Jean Gelman Taylor, *Indonesia: Peoples and Histories*, (New Haven and London: Yale University Press, 2003), h. 29-30.

dagangannya, mereka pada sore hari (setelah berjualan) atau di sela-sela waktu senggang dimanfaatkan untuk menceritakan hal ihwal tentang agama kepada masyarakat di mana ia berdagang, walaupun secara sederhana. Masuknya pendidikan agama ke daerah pesisir dan merubah kepercayaan masyarakatnya ke dalam agama yang dibawa oleh pendatang asing, sebagaimana tergambar oleh laporan Ying-yai Sheng-lan⁸ bahwa:

Visited the Java coast in 1416 and reported in his book, Ying-yai Sheng-lan: The overall survey of the ocean's shores' (1433), that there were only three types of people in Java: Muslims from the west, Chinese (some Muslim) and the heathen Javanese.

Pada masa peradaban Hindu, dikenal sistem kasta dimana kaum brahmana yaitu kaum ulama yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sastra, bahasa, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksakta (perbintangan, ilmu pasti dan perhitungan), seni bangunan, seni rupa dan ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan pada masa peradaban Hindu banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang ada di India. Namun, pada perkembangannya kemudian kebudayaan Hindu tersebut semakin berbaur dengan kebudayaan asli Indonesia sehingga menimbulkan ciri serta coraknya yang khas.

Sampai jatuhnya kerajaan Hindu terakhir di Indonesia yaitu Majapahit pada abad ke-5, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang, khususnya dalam bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata Negara dan hukum. Kerajaan-kerajaan Hindu pun akhirnya mencetak empu-empu yang menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi salah satunya yang terkenal yaitu “Sotasoma” karya empu Tantular.

Namun pada abad terakhir menjelang jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, proses penyelenggaraan pendidikan pun tidak sebesar sebelumnya. Mereka hanya menyelenggarakan pendidikan di padepokan. Dimana hanya kaum ulama yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan yang bersifat religius kepada siswanya dalam jumlah yang terbatas. Siswanya pun dituntut agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja. Sifat pendidikan tersebut tidak formal sehingga banyak siswa yang tidak puas dan berusaha mencari dan berpindah-pindah guru. Untuk pendidikan kejuruan atau keterampilan pada masa itu disesuaikan dengan kastanya masing-masing.

⁸Ma Huan's, *Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores' (1433)*. Ed. and transl. J.V.G. Mills, (Cambridge, United Kingdom: University Cambridge Press, 1970), h. 65.

Selain Hindu, ada pula pendidikan agama Budha, misalnya saja pada masa Kerajaan Sriwijaya yang dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Budha di Asia Tenggara. Banyak pendeta-pendeta dari India yang datang ke Sriwijaya setelah terbangunnya relasi atau jalan menuju Sriwijaya untuk mengajarkan agama.

Pada masa peradaban Islam, mulanya proses pendidikannya dilakukan oleh para Gujarat di kerajaan-kerajaan pesisir. Karena kerajaan pesisirlah yang mengalami banyak interaksi dengan bangsa asing dibanding dengan kerajaan pusat yang berada di pedalaman. Pada waktu itu Islam disambut dengan baik oleh kerajaan pesisir dan mereka segera memisahkan diri dari ajaran kerajaan pusat. Setelah itu Islam langsung berkembang pesat di Indonesia.

Sistem pendidikan dan pengajaran pada masa peradaban Islam ada 3 yaitu pendidikan di langgar, pesantren dan madrasah yang masing-masing memiliki ciri tertentu. Sampai sekarang pun model pendidikan peradaban Islam masih tetap bertahan.

Masa peralihan dari agama Hindu ke Islam berjalan secara damai dan tenang. Pada saat itu ada dua tipe guru, pertama guru keraton atau kaum bangsawan yang dipanggil ke keraton untuk mendidik anak-anak raja dan ksatria lainnya. Kedua, guru petapa yang bertapa di tempat-tempat menyendiri dan mempelajari ilmu-ilmu keTuhanan. Di guru yang kedua inilah para penyebar agama Islam banyak berhubungan sehingga melalui mereka ajaran Islam tersebar luas di Indonesia. Guru-guru petapa ini yang pada akhirnya disebut Wali Songo.

Dari agama-agama yang masuk ke daerah pesisir yang paling kuat adalah agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam berada di daerah pesisir,⁹ seperti Kerajaan Cirebon, Demak, Banten, Samudera Pasai¹⁰ dan lain-lain. Melalui kerajaan-kerajaan ini, Islam kemudian diajarkan dan disebarkan ke seluruh negeri sehingga menjadi agama yang dianut secara mayoritas baik pesisir maupun pedalaman.

Pada saat Islam pertama kali di Indonesia melalui daerah pesisir, para pedagang muslim mengajarkan tentang pendidikan yang berbasis Islam.

⁹M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1300*, 2nd Edition, (London: MacMillan, 1991), h. 48

¹⁰Raden Abdulkadir Widjoatmodjo, "Islam in the Netherlands East Indies". In *The Far Eastern Quarterly* 2 (1), (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press on behalf of the Association for Asian Studies, (November 1942), h. 48–57; Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: an Account of Institutional Formation*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 169.

Mereka melakukan kontak dagang dengan penduduk pesisir Indonesia. Hubungan pergaulan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat pada akhirnya dapat menarik hati penduduk pesisir untuk memeluk Islam. Pada masa awal, saudagar-saudagar muslim yang dikenal cukup mendominasi perdagangan dengan Nusantara. Besarnya pengaruh pedagang muslim mampu memperkenalkan pendidikan terutama nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai perdagangan yang memberikan keuntungan ekonomi secara maksimal, sekaligus mereka membatasi adanya pilihan terhadap agama-agama lain.

Pendidikan melalui jalur perdagangan ini menjadikan bandar sebagai pusat perdagangan memainkan peranan yang sangat penting. Disinilah tempat berkumpul dan beriteraksi masyarakat pribumi pesisir dengan para pedagang dari berbagai negara terutama dari negara-negara Timur Tengah yang notabene beragama Islam.

Peranan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan dapat kita lihat jejaknya. Para pedagang di dalam kota mempunyai perkampungan sendiri-sendiri yang penempatannya ditentukan atas persetujuan dari penguasa kota tersebut, misalnya di Aceh, terdapat perkampungan orang Portugis, Benggal, Cina, Gujarat, Arab, dan Pegu.

Dari cikal bakal pendidikan daerah pesisir yang dimulai dari bandar-bandar perdagangan kemudian berkembang kepada pendidikan yang semakin jelas melembaga. Pada mulanya dengan didirikan pendidikan ala pesantren dimana surau dan masjid sebagai pusat kegiatannya.

Pendidikan agama dapat terjadi disebabkan karena banyak faktor. Ada faktor politik, ekonomi maupun kepercayaan. Faktor politik ada sejak zaman kerajaan banyak para saudagar Islam atau ulama yang menikahi puteri-puteri raja atau pembesar setempat. Karena dalam sistem dunia kerajaan pada umumnya rakyat akan mengikuti agama sang raja maka ketika rajanya sudah masuk Islam maka secara otomatis sebagian besar atau bahkan semua rakyat juga akan turut masuk Islam.

Namun hal ini tampaknya sudah tidak relevan dengan dunia pesisir saat ini. Hal itu disebabkan karena memang zamannya sudah berbeda yaitu bukan lagi sistem kerajaan. Dan adapun yang masih mempertahankan sistem kerajaan namun kadar aturan dalam masyarakat sudah sangat kendur (tidak mengikat). Serta asas negara Indonesia saat ini yaitu demokrasi. Masyarakat bebas

menentukan pilihannya sendiri sesuai keyakinan yang dianutnya. Jadi penguasa setempat tidak begitu berpengaruh lagi dalam hal keterikatan menganut agama.

Faktor selanjutnya adalah pendidikan ekonomi. Bahwa banyak gadis-gadis kampung pesisir yang secara ekonomi keluarganya kurang mampu sehingga ketika ingin dipersunting atau dinikahi oleh para saudagar kaya baik Islam, Hindu-Budha, Kristen maupun agama yang lain maka gadis tersebut akan mau menerima pinangan itu. Pada umumnya saudagar-saudagar besar yang berhasil mempengaruhi penduduk kampung pesisir adalah mereka yang memiliki reputasi tinggi baik dalam hal kekayaan ataupun keimanan.

Faktor yang ketiga adalah kepercayaan. Bahwa masyarakat di pesisir mau berpindah agama atau meningkatkan agamanya yang sudah ada karena faktor kepercayaan. Hal ini lebih menyangkut tingkat kesholehan. Hal itu berdasarkan ilham yang diperoleh langsung dari Tuhan kepada setiap insan manusia. Mereka percaya bahwa apa yang mereka anut adalah yang terbaik bagi mereka. Mereka percaya bahwa agama yang mereka anut adalah yang mampu membawa mereka pada kebahagiaan, ketentraman baik di dunia maupun di akhirat.

Di lingkungan masyarakat pesisir tentu mudah untuk kita temukan masjid-masjid, gereja-gereja, vihara-vihara atau tempat-tempat sembahyang. Keberagaman tersebut ada karena sifat dinamika masyarakat pesisir itu sendiri yang terbuka sehingga berbagai kepercayaan berkumpul dalam satu kawasan. Masing-masing difungsikan oleh para penggunanya yaitu para pedagang atau saudagar-saudagar yang sedang bersinggah atau mendarat setelah sekian hari mereka terapung di laut lepas.

Dari sekian bentuk-bentuk pendidikan tersebut tentu kita harus mengetahui bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana karakter masyarakatnya dan sebagainya. Sifat masyarakat yang terbuka (non-isolasi) secara otomatis membuka ruang atau celah bagi masyarakat luar. Terbukanya ruang memberi kesempatan bagi siapa saja yang memiliki rencana untuk mencapai visi, misi dan tujuannya. Ada yang berekspansi untuk berdagang, ada pula yang lebih dari sekedar itu yaitu menyebarkan budaya serta menyebarkan kepercayaan (religi).

Proses pendidikan dalam penetrasi-penetrasi terwujud akibat dua pihak yang saling mempengaruhi-dipengaruhi. Pertama sebagai pihak yang melakukan atau memberi. Kedua sebagai pihak pasif yang menerima. Tidak semua menerima tetapi setidaknya ketika mayoritas berkata sepakat untuk menerima maka apa yang dinamakan penetrasi pasti akan terjadi bagaimanapun prosesnya, sulit atau mudah.

Setelah masa masuknya agama Hindu, Budha dan Islam. Mulailah berdatangan para penjajah yang ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia guna mengambil seluruh hasil rempah-rempah melalui bandar-bandar yang ada di pesisir. Mereka juga memberikan pendidikan terhadap masyarakat Indonesia namun orientasinya masih tetap pada proses penyebaran agama yang dibawanya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan terutama di daerah pesisir disesuaikan dengan dasar dan cita-cita dari Bangsa dan Negara Merdeka. Oleh karena itu UUD 1945 dan Pancasila lah yang dijadikan landasan idiil pendidikan Indonesia. Walaupun UUD mengalami banyak perubahan namun dasar negara kita tetap sama. Maka Pancasila tetap menjadi landasan idiil pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan pada masa ini lebih menekankan penanaman semangat patriotism agar menjadi warga Negara yang sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Negara dan bangsa.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu, Negara dan bangsa sedang mengalami perjuangan fisik dan sewaktu-waktu bangsa Belanda masih akan berusaha menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu dirasa sangat penting penanaman semangat patriotisme agar kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan dan diisi.

Pada bulan Desember 1949, UUD 1945, diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Landasan idiil pendidikan Indonesia tidak berubah namun tujuannya berubah. Sebagai warga Negara yang sudah merdeka dan menganut sistem demokrasi maka tujuan pendidikannya pun harus menghasilkan warga Negara yang demokratis pula. Sistem persekolahannya tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Jepang, yaitu pendidikan dasar (6 tahun), pendidikan menengah (masing-masing 3 tahun), dan pendidikan tinggi. Semuanya dibuka untuk umum tidak ada lagi berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu.

Seiring dengan upaya pemerintah membuka sekolah lebar-lebar untuk semua lapisan masyarakat maka minat secara umum akan memperoleh pendidikan pun semakin tajam sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan usaha usaha yang mengharuskan pemerintah untuk menampung hasrat dan keinginan belajar mereka. Diantaranya menambah jumlah sekolah rakyat, menambah durasi pendidikan sekolah rakyat menjadi 6 tahun dan menambah mutu dan tingkat pendidikan.

Bukan hanya itu, hal tersebut juga mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki segala fasilitas sekolah, menambah tenaga pengajar dan mengubah kurikulum yang semula demi kepentingan kolonial menjadi selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Perubahan-perubahan tersebut sudah tentu memerlukan biaya. Seberapa besar biaya yang dikeluarkan sangat sulit diperoleh, mengingat periode ini merupakan periode fisik dalam mempertahankan kemerdekaan.

Namun dalam perkembangannya pembangunan pendidikan tersebut tidak dilakukan secara merata. Peningkatan kualitas pendidikan lebih cenderung pada wilayah-wilayah tertentu terutama perkotaan. Daerah pesisir masih kurang banyak tersentuh pembangunan, termasuk di masa Reformasi ini. Sehingga pendidikan di daerah tersebut tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Keadaan ini membawa dampak yang kurang baik bagi kualitas hidup masyarakat pesisir yang umumnya dikenal sebagai *poorest of the poor*. Hal ini berbanding terbalik jika dilihat pada awal perkembangan pendidikan yang berhasil menjadikan kehidupan pesisir menggeliat dan dinamis dengan masuknya pendidikan asing dan dukungan sumberdaya alam pesisir yang kaya akan hasil laut.

KESIMPULAN

Masyarakat pesisir di Indonesia adalah masyarakat yang pada umumnya memiliki tipikal terbuka. Tidak heran apabila budaya luar baik dari luar daerah, luar pulau, luar suku, luar etnis sampai luar negara dapat kita jumpai di kota-kota pesisir pantai di Indonesia. Sifat keterbukaannya pada dunia luar membuat celah dan peluang bagi masuknya proses pendidikan dalam wujud pengaruh baik ekonomi, budaya maupun kepercayaan dari luar yang datang silih berganti. Dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas adalah berdagang (pengusaha) dan nelayan membuka ruang bagi mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang luar. Relasi-relasi itulah yang membuka jalan bagi mereka yang memiliki visi, misi dan tujuan tertentu dalam arus pendidikan.

Ketika visi, misi dan tujuan sudah dijalankan maka dampak dan pengaruh secara cepat atau lambat akan dapat dirasakan. Yang awalnya disengaja dalam keberjalanannya menjadi sesuatu yang ganda yaitu bisa disengaja dan tidak disengaja. Akhirnya pendidikan pun tidak dapat dihindari. Saya melihat tiga macam proses pendidikan dalam penetrasi yang bisa dilihat baik secara empiris

maupun non-empiris yaitu pendidikan ekonomi (*economy*), pendidikan budaya (*culture*) dan pendidikan agama (kepercayaan/religi). Ketiganya begitu mudah kita jumpai dan kita temukan. Pendidikan ekonomi melalui penyebaran pengaruh sistem-sistem perekonomian utamanya adalah sistem kapitalisme (untung-rugi). Pendidikan budaya cakupannya lebih luas meliputi berbagai macam budaya yang ada di masyarakat pesisir. Hal itu sejalan dengan tipikal struktur masyarakatnya yang cenderung beragam baik suku, etnis, budaya dan agama. Sedangkan pendidikan kepercayaan (agama) lebih mengarah pada usaha pendakwah dalam menyebarkan berbagai macam aliran/agama yang kemudian mendapat tanggapan dari pihak penerima yaitu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Karena sifatnya yang dinamis, terbuka maka siapa saja bisa menyebarkan agama entah ke depannya berhasil atau tidak. Tetapi pada kenyataannya agama menjadi pluralitas dalam masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2006. *Islam in the Indonesian World: an Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Harwell, Owen J. Lynch-Emily. 2002. *Whose Natural Resources? Whose mmon Good? Toward a New Paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*. Washington D.C, U.S.A.: Center of International Environment Law (CIEL).
- Hendry, Joy. 1999. *An Introduction to Social Anthropolgy : Other Peoples Works*, London: MacMillan Press Ltd.
- Huan's, Ma. 1970. *Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores' (1433)*. Ed. and transl. J.V.G. Mills. Cambridge, United Kingdom: University Cambridge Press.
- Jenks, Chris. 1998. *Core Sociological Dichotomies*. London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE.
- Joyopuspito, Sunaryo, 2006. *Musik Keroncong: Suatu Analisis Berdasarkan Teori Musik*. Jakarta: Bina Musik Remaja.
- Kato, Tsuyoshi. 1986. "Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX" dalam Akira Nagzumi. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Rand, Ayn. 1967. *Capitalism: The Unknown Ideal* (paperback 2nd ed.). New York: Signet.

- Ricklefs, M.C. 1991. *A History of Modern Indonesia Since c.1300*, 2nd Edition. London: MacMillan.
- Schoppert, P., Damais, S. 1997. *Java Style*, Paris: Didier Millet.
- Suparlan, Parsudi. 1998. "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi", dalam Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, Jakarta: Pusjarlit.
- Taylor, Jean Gelman. 2003. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Haven and London: Yale University Press.
- Widjojoatmodjo, Raden Abdulkadir (November 1942). "Islam in the Netherlands East Indies". In *The Far Eastern Quarterly* 2 (1). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press on behalf of the Association for Asian Studies